

BAB VI

PEMBANGUNAN EKONOMI

A. UMUM

Sejak timbulnya krisis ekonomi yang dipicu oleh krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, pertumbuhan ekonomi nyaris terhenti dan laju inflasi meningkat pesat. Akibatnya pendapatan dan taraf hidup masyarakat merosot tajam dimana jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran membengkak dalam waktu yang sangat singkat. Langkah-langkah pemulihan dan reformasi ekonomi untuk menggerakkan perekonomian dan memulihkan kesejahteraan rakyat selama periode 1998-2000 dirasakan berjalan lambat karena persoalan yang dihadapi menjadi sangat multi-dimensional.

Krisis ekonomi telah mengangkat kepermukaan beberapa kelemahan dalam penyelenggaraan perekonomian baik pada tingkat nasional maupun regional. Berbagai distorsi yang terjadi pada mata rantai perekonomian masa lalu telah menyebabkan lemahnya ketahanan ekonomi dalam menghadapi krisis, memicu berbagai bentuk kesenjangan sosial, dan menghambat kemampuan untuk mengatasi krisis dengan cepat. Kurang meratanya penyebaran pelaksanaan pembangunan antar wilayah kota, kecamatan dan kelurahan dan antar kawasan telah menimbulkan kesenjangan penyediaan prasarana dan sarana ekonomi yang pada gilirannya juga memperlemah basis kegiatan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, ke depan, pembangunan ekonomi khususnya di Propinsi DKI Jakarta akan menghadapi dua tantangan utama yaitu yang terkait dengan isu globalisasi dan perdagangan bebas, dan isu desentralisasi. *Pertama*, perlunya peningkatan daya saing industri dan sumber daya lokal menghadapi kompetisi yang semakin ketat serta upaya memperoleh keunggulan untuk memperkuat ketahanan dan kesinambungan ekonomi. *Kedua*, perlunya dilakukan desentralisasi ekonomi secara bertahap agar potensi sumber daya ekonomi di Propinsi DKI Jakarta dapat segera digerakkan dan diberdayakan menjadi kegiatan ekonomi yang didukung oleh makin tumbuhnya prakarsa, jiwa

wirausaha, dan kemampuan berusaha di kalangan masyarakat. Proses desentralisasi ekonomi tetap harus dilakukan dalam semangat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan.

Pengalaman membangun pada masa lalu yang bermuara pada krisis yang berkepanjangan dapat digunakan sebagai pelajaran berharga. Secara normatif, untuk membangun perekonomian yang kuat, sehat dan berkeadilan, pembangunan ekonomi harus dilaksanakan dengan mengedepankan partisipasi masyarakat berdasarkan aturan main yang jelas, etika dan moral yang baik, nilai-nilai yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta persamaan derajat, hak, dan kewajiban warga negara, termasuk kesetaraan dan keadilan jender.

Untuk itu maka model pembangunan ekonomi Propinsi DKI Jakarta pada masa yang akan datang harus berbeda dengan pembangunan ekonomi Propinsi DKI Jakarta sebelum terjadinya krisis. Wujud perekonomian yang akan dibangun harus mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan melalui partisipasi masyarakat secara luas namun tetap mempertimbangkan pencapaian daya saing dan efisiensi serta daya dukung lingkungan untuk kehidupan keberlanjutan.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi Propinsi DKI Jakarta yang nantinya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, yaitu (1) pembangunan ekonomi dilaksanakan dengan mengedepankan partisipasi masyarakat untuk secepatnya mencapai kesejahteraan yang lebih baik, lebih merata, dan lebih berkeadilan, (2) pembangunan ekonomi harus dilandasi oleh arah otonomi daerah yang benar, yang mengarah pada kemandirian, kesejahteraan dan keberlanjutan, (3) pembangunan ekonomi harus menerapkan prinsip efisiensi yang didukung oleh peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan daya saing daerah, (4) pembangunan ekonomi sepatutnya juga berorientasi pada perkembangan global perekonomian dunia dengan tetap mempertimbangkan peluang dan potensi Propinsi DKI Jakarta sendiri, (5) penetapan target pembangunan ekonomi harus dirumuskan secara hati-hati dan moderat karena faktor-faktor ketidakpastian yang meningkat akibat kondisi nasional dan proses globalisasi, (6) pembangunan ekonomi dilaksanakan berlandaskan arah kebijakan yang disusun secara adil,

transparan dan bertanggung jawab, baik dalam hal pelayanan publik maupun pengelolaan pemerintahan dan pembangunan, (7) pembangunan ekonomi harus memperhitungkan keberlanjutan sistem sumber daya yang dimiliki, sistem lingkungan hidup, dan sistem sosial kemasyarakatan.

B. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan di bidang ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Pariwisata

Menjadikan sektor pariwisata sebagai sumber potensial dalam penciptaan pendapatan masyarakat, penyerapan lapangan kerja dan penerimaan daerah serta wahana pelestarian sumber daya pariwisata potensial yang menjadi andalan perekonomian Propinsi DKI Jakarta.

2. Industri dan Perdagangan

Menjadikan usaha industri yang sehat, berteknologi tepat guna, mandiri dan bersaing dalam era globalisasi, ramah lingkungan, mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya termasuk investasi serta meningkatkan ekspor. Sedangkan untuk perdagangan, menciptakan sistem perdagangan yang sehat, efektif dan efisien, adil dan dinamis bagi semua skala usaha, serta mengembangkan jaringan distribusi produk industri dan perdagangan.

3. Pengembangan Usaha Daerah

Meningkatkan profesionalisme dan kinerja pengelolaan usaha daerah sehingga mampu tumbuh, berkembang dan bersaing secara sehat di era globalisasi serta menjadi sumber penerimaan daerah. Disamping itu perlu meningkatkan iklim kondusif bagi berkembangnya investasi dan usaha-usaha swasta secara lebih efektif, efisien dan produktif.

4. Usaha Kecil, Menengah (UKM) dan Koperasi

Mendorong berkembangnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang sehat, dinamis serta mengurangi hambatan usaha sehingga UKM dapat

menjadi pilar perekonomian Jakarta dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan ekspor. Sedangkan untuk koperasi, mendorong tumbuhnya koperasi serba usaha yang secara nyata dibutuhkan masyarakat, dan memperluas jaringan sehingga mampu mengisi mata rantai kegiatan ekonomi yang dijalankan masyarakat, serta menjadikan koperasi sebagai gerakan masyarakat.

5. Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Mendorong tumbuhnya kerjasama antar daerah dalam pengembangan peternakan diluar Jakarta yang menjamin ketersediaan produk peternakan bagi masyarakat Jakarta dengan harga terjangkau dan sesuai standar kesehatan yang ditentukan, serta mengurangi ketergantungan pada impor. Sedangkan untuk perikanan dan kelautan mendorong perkembangan usaha perikanan yang lebih efisien, produktif dan bernilai tambah tinggi, serta mengurangi berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi nelayan.

6. Pertanian dan Kehutanan

Mengembangkan agrobisnis dan menjamin ketersediaan pangan dan gizi masyarakat dalam jumlah cukup dan harga yang terjangkau. Mengembangkan produk buah-buahan khas Jakarta dan tanaman buah-buahan untuk mensuplai kebutuhan warga kota dan daya tarik wisata. Sedangkan untuk kehutanan, meningkatkan pengendalian penggunaan/konsumsi kayu serta memperluas hutan kota dan hutan lindung untuk kesinambungan ekosistem perkotaan.

C. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

Menghadapi masalah dan tantangan pembangunan ke depan serta berpedoman pada arah dan kebijakan dan keterbatasan sumber daya yang tersedia, perlu ditetapkan prioritas program pembangunan di bidang ekonomi. Prioritas jangka pendek (2003-2004) adalah program-program untuk mempercepat pemulihan ekonomi disertai dengan upaya mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang meningkat selama krisis. Bersamaan

dengan upaya pemulihan ekonomi, dilaksanakan program pembangunan ekonomi jangka menengah (2002-2007) untuk meletakkan landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berlandaskan sistem ekonomi partisipatif.

Pelajaran yang sangat penting dalam masa krisis adalah perlunya mengintegrasikan nilai keadilan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dan hasil pembangunan yang dicapai harus dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Sejalan dengan itu, perekonomian dengan partisipasi masyarakat sebagai tulang punggungnya harus menjadi paradigma baru pembangunan ekonomi Propinsi DKI Jakarta.

Sebagai suatu sistem perekonomian, komponen utama sistem ekonomi partisipatif yang dikembangkan di Propinsi DKI Jakarta adalah (1) sumber daya manusia sebagai produsen, konsumen, tenaga kerja, dan sebagai pengusaha dan (2) sumber daya alam dan lingkungan hidup termasuk tanah, air, udara dan lingkungan sebagai tempat sumber daya manusia melakukan aktivitasnya. Sedangkan ciri-ciri sistem ekonomi partisipatif adalah sebagai berikut:

1. Adanya penegakan prinsip keadilan dan demokrasi ekonomi disertai kepedulian terhadap yang lemah. Maksudnya seluruh potensi masyarakat baik sebagai konsumen, pengusaha maupun sebagai tenaga kerja (tanpa membedakan suku, agama, dan jender) mendapatkan kesempatan, perlindungan dan hak untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi.
2. Adanya keberpihakan, pembelaan, pemberdayaan, dan perlindungan pemerintah terhadap yang lemah melalui upaya penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UKMK) termasuk petani dan nelayan kecil. Bagi kelompok penduduk yang secara fisik mempunyai keterbatasan, diupayakan untuk meningkatkan kemampuannya dengan membuka akses yang lebih luas. Bagi penduduk miskin, diupayakan agar tetap memperoleh pendidikan, pelatihan, dan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau. Sedangkan bagi UKMK diupayakan meningkatkan kemampuan dan

usahanya melalui berbagai pelatihan dan akses kepada permodalan, informasi pasar, dan teknologi tepat guna.

3. Adanya iklim persaingan usaha yang sehat dan pasar yang kompetitif dengan tetap mengembangkan hubungan kemitraan antara usaha besar dan UKMK berlandaskan kompetensi masing-masing.
4. Adanya keinginan baik semua pihak untuk meningkatkan pengembangan usaha kecil dan menengah, melalui infrastruktur sosial dan ekonomi serta kelembagaan dan jaringan kerja.
5. Adanya keinginan bersama semua elemen masyarakat untuk mempertahankan sumber daya lingkungan perkotaan, kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta perbaikan wajah kota Jakarta yang lebih asri, nyaman dan aman.

Secara konkret upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Propinsi DKI Jakarta berlandaskan sistem ekonomi partisipatif, dilakukan dalam berbagai fungsi pembangunan kota mencakup pariwisata, industri dan perdagangan, usaha daerah, usaha kecil, menengah dan koperasi, peternakan dan perikanan dan kelautan, serta pertanian dan kehutanan, dengan uraian program sebagai berikut:

1. Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Propinsi DKI Jakarta, baik dilihat dari kontribusinya pada PDRB, pada penyediaan lapangan kerja maupun pada penerimaan pajak dan retribusi daerah, dan penerimaan devisa. Dari dimensi yang lain, pertumbuhan pariwisata yang positif mencerminkan pula tingkat kepercayaan wisatawan yang semakin besar, baik pada produk pariwisata yang ditawarkan maupun pada infrastruktur pendukungnya.

Saat ini jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Propinsi DKI Jakarta sangat berfluktuasi disebabkan oleh situasi keamanan ibukota yang seringkali kurang mendukung. Oleh karena itu, dalam jangka pendek pengembangan pariwisata perlu diprioritaskan pada upaya pemulihan

citra pariwisata Propinsi DKI Jakarta sebagai daerah wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi. Sedangkan dalam jangka menengah adalah meletakkan landasan yang kokoh bagi pengembangan pariwisata melalui pengembangan produk pariwisata dan perluasan pasar pariwisata.

1.1. Program Pengembangan Produk Pariwisata

Pada dasarnya pengembangan pariwisata merupakan perpaduan antara pengembangan produk pariwisata dan pengembangan pemasaran pariwisata melalui pendekatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat (*community-based tourism development*) dengan dukungan infra dan supra struktur yang memadai.

Tujuan program ini adalah mengembangkan dan memperluas diversifikasi produk dan kualitas pariwisata Propinsi DKI Jakarta berdasarkan potensi yang dimiliki serta berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Adapun potensi yang dimiliki mencakup kesenian dan kebudayaan Betawi, wisata belanja, wisata agro dan wisata bahari dengan tetap memperhatikan kelestarian seni dan budaya itu sendiri serta kelestarian lingkungan. Untuk mencapai sinergi perlu makin ditingkatkan keterpaduan dan kerjasama antar instansi terkait.

Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah: (1) meningkatnya efektifitas kegiatan pariwisata sebagai wahana promosi seni, budaya tradisional, dan potensi pariwisata lainnya, (2) terwujudnya kegiatan pariwisata sebagai wahana pemahaman dan penghargaan terhadap seni dan budaya yang dimiliki, (3) terwujudnya kegiatan pariwisata sebagai wahana berkreasi di bidang kesenian sekaligus wahana pengembangan dan pengkayaan budaya baru sesuai tantangan masa depan, (4) meningkatnya peran aktif masyarakat dan usaha kecil dan menengah (UKM) dalam pengembangan produk pariwisata, dan (5) meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana bagi usaha pariwisata dan wisatawan.

Untuk mencapai sasaran-sasaran di atas, kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah: (1) merumuskan reformasi kebijakan pengembangan pariwisata daerah berlandaskan pemberdayaan masyarakat melalui keterpaduan antara manusia dan lingkungannya sebagai potensi pariwisata sesuai dengan tuntutan desentralisasi dan tantangan globalisasi, (2) mengembangkan serta memperkaya kesenian dan kebudayaan tradisional Betawi, wisata belanja, wisata agro dan wisata bahari, MICE, sebagai produk wisata potensial, (3) meningkatkan koordinasi pengembangan pariwisata melalui pembentukan forum lintas pelaku pariwisata dan pembentukan jaringan kerja (*networking*), dan (4) meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan bagi pengembangan usaha pariwisata dan wisatawan.

1.2. Program Pengembangan Pasar Pariwisata

Tujuan program ini adalah mengembangkan pasar pariwisata Propinsi DKI Jakarta terutama untuk pasar dalam dan luar negeri, melalui perluasan jaringan pariwisata antar daerah dan dengan luar negeri.

Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah: (1) meningkatnya jumlah wisatawan baik mancanegara maupun nusantara, yang datang ke Propinsi DKI Jakarta, (2) meningkatnya sumbangan pariwisata dalam perolehan devisa dan pendapatan masyarakat, (3) meningkatnya kualitas manajerial pengelolaan produk pariwisata dan keterpaduannya dengan upaya pemasaran pariwisata.

Untuk mencapai sasaran-sasaran di atas, kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah: (1) merumuskan strategi pemasaran industri pariwisata dengan penekanan pada keterpaduan antara produk dan pemasaran pariwisata, (2) mengembangkan sistem dan jaringan informasi pariwisata antar daerah dalam rangka penguatan dan pengembangan promosi pariwisata yang terpadu ke pasar global, (3) meningkatkan aksesibilitas ke tujuan-tujuan wisata potensial sekaligus peningkatan mutu dan profesionalisme jasa pelayanan, (4) meningkatkan kemampuan lembaga

pelayanan publik melalui peningkatan sumber daya manusia dan penyediaan peraturan terkait yang kondusif bagi pengembangan industri pariwisata, dan (5) meningkatkan sarana dan prasarana untuk memperkuat jaringan pelayanan dan pemasaran produk pariwisata daerah.

1.3. Program Pengembangan Sarana dan Pelayanan Pariwisata

Tujuan dari program ini adalah untuk memperluas jangkauan jasa pelayanan sarana dan prasarana pariwisata sampai ke wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau. Perluasan jaringan sarana dan prasarana tersebut diprioritaskan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat untuk berwisata, termasuk telekomunikasi, tenaga listrik dan transportasi.

Sasaran dari program ini adalah tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata serta meningkatnya pelayanan pariwisata.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: (1) memperluas jangkauan pelayanan sarana pariwisata ke seluruh wilayah, (2) memperkuat dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam kepariwisataan dengan memperhatikan mekanisme tarif yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat.

2. Industri dan Perdagangan

Sektor industri dan perdagangan diharapkan dapat menjadi penggerak (*prime-mover*) pembangunan ekonomi di Propinsi DKI Jakarta sesuai perannya dalam struktur perekonomian daerah. Namun demikian antara kedua sektor ini belum terlihat adanya pola keterkaitan yang kuat terutama berkaitan dengan jaringan sektor produksi dan distribusi barang, baik dalam memenuhi kebutuhan di Propinsi DKI Jakarta sendiri maupun untuk kepentingan ekspor.

Disamping itu, pengembangan jaringan yang kuat dan luas diperlukan untuk menjawab tantangan persaingan global yang makin ketat. Dalam

konteks ini, pengembangan industri tidak diartikan hanya untuk pengembangan kelompok industri pengolahan saja, tetapi mencakup pengembangan seluruh mata rantai kegiatan produksi dan distribusi, mulai dari sektor penyedia bahan baku, pengolahan, hingga sektor perdagangan dan jasa (primer, sekunder dan tersier) untuk mewujudkan struktur produksi dan distribusi yang kokoh dan berkelanjutan. Untuk itu seluruh basis produksi dan distribusi perlu ditata secara terpadu dan dikembangkan secara sinergis dengan memanfaatkan secara optimal keunggulan komparatif yang dimiliki Propinsi DKI Jakarta.

Lebih lanjut, kebijakan industri, perdagangan dan investasi perlu diarahkan untuk meningkatkan daya saing global melalui keunggulan kompetitif terutama basis keunggulan komparatif sumber daya lokal dan sumber daya manusia yang dimiliki Propinsi DKI Jakarta. Selain itu, sebagai tulang punggung perekonomian Propinsi DKI Jakarta, pengembangan industri yang berskala kecil dan menengah berbasis sumber daya lokal perlu lebih ditingkatkan.

Dalam rangka mengintegrasikan pembangunan sektor-sektor primer, sekunder dan tersier, termasuk keseimbangan persebaran lokasi pembangunannya, ditempuh pendekatan kawasan industri. Melalui pendekatan ini diharapkan pola keterkaitan antar kegiatan baik di dalam sektor industri sendiri (keterkaitan horisontal) maupun antara sektor industri dengan seluruh jaringan produksi dan distribusi terkait (keterkaitan vertikal) akan dapat secara responsif menjawab tantangan persaingan global yang semakin ketat. Dipilihnya konsep pendekatan kawasan industri didorong oleh pemikiran bahwa berbagai kebijakan yang lalu bersifat parsial dan memberi preferensi lebih pada kegiatan industri tertentu yang cenderung kurang memperhatikan keterkaitan horisontal maupun vertikal, sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan pada gilirannya justru melemahkan daya saing lokal dan global.

Pengembangan kawasan industri tentunya membutuhkan rumusan strategi industrialisasi daerah yang perumusannya melibatkan unsur

pemerintah, termasuk pemerintah daerah, bersama seluruh pelaku usaha. Strategi daerah tersebut memuat arahan spesifik pengembangan masing-masing kawasan industri yang secara khusus mempertimbangkan potensi sumber daya di masing-masing lokasi. Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah beserta pelaku usaha sektor swasta terkait memiliki peluang lebih besar di dalam menciptakan lingkungan bisnis lokal yang kondusif. Pada hakekatnya, konsep kawasan industri merupakan bentukan organisasi industrial yang paling sesuai guna menjawab tantangan globalisasi, tuntutan desentralisasi, dan sekaligus mendorong terbentuknya jaringan kegiatan produksi dan distribusi serta pengembangan pengusaha UKM.

Adapun program-program pengembangan industri dan perdagangan adalah sebagai berikut:

2.1. Program Penataan dan Penguatan Basis Industri dan Perdagangan

Program ini bertujuan untuk membangun industri dan perdagangan Propinsi DKI Jakarta yang kokoh dan berdaya saing tinggi, ramah lingkungan (*clean industry*), serta didukung oleh basis kegiatan produksi dan distribusi yang kuat dengan memberi ruang yang lebih besar bagi tumbuh dan berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam rangka penataan dan pengembangan industri dan perdagangan tersebut, kebijakan diarahkan untuk (1) meningkatkan produktivitas dan tumbuhnya spesialisasi usaha, (2) meningkatkan kemampuan daya saing melalui keterkaitan usaha antara kegiatan produksi, distribusi dan penguatan struktur industri dan perdagangan, (3) memperluas basis kegiatan produksi dan distribusi serta perdagangan yang berdaya saing, (4) mempertajam sasaran pengembangan usaha sesuai potensi sumber daya yang dimiliki dan daya dukung lingkungan, (5) memberi pendapatan dan kesejahteraan yang lebih baik pada masyarakat, serta (6) memberi lapangan kerja yang lebih banyak bagi angkatan kerja yang jumlahnya semakin besar.

Sasaran program ini adalah: (1) terwujudnya proses industrialisasi yang mantap dengan dasar sistem keterkaitan yang terintegrasi antara

kegiatan industri dengan kegiatan industri lainnya yang terkait dan antara industri dengan kegiatan distribusi, (2) makin kokohnya pengembangan kawasan industri berbasis sumber daya manusia dan sumber daya potensial lainnya, (3) meningkatnya sarana dan prasarana pendukung pengembangan industri dan perdagangan, (4) meningkatnya keragaman basis produksi dan distribusi yang berdaya saing global, (5) terciptanya struktur usaha perdagangan yang lebih sehat dan berkeadilan antara usaha kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar, (6) terbina dan tertatanya pedagang kaki lima (PKL), (7) terwujudnya institusi pasar yang lebih kuat, dan (8) terealisasinya dukungan dan bantuan bagi tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan menengah yang lebih produktif, efektif dan efisien.

Untuk mencapai sasaran tersebut, kegiatan pokok yang dilakukan adalah: (1) melakukan pengkajian basis ekonomi industri dan perdagangan termasuk keterkaitannya dengan sektor-sektor produksi lainnya dan sektor distribusi, (2) menata kembali struktur usaha perdagangan dari dimensi skala usaha dan lokasi penyebarannya, (3) merumuskan strategi peningkatan daya saing melalui pengembangan kawasan industri berbasis sumber daya pertanian dan perikanan, kawasan industri berbasis tenaga kerja terampil dan terlatih, dan kawasan industri berbasis padat modal, (4) mengembangkan pola keterkaitan usaha produksi, distribusi dan jasa pelayanan serta perdagangan dalam kawasan industri, (5) mengembangkan dan menerapkan standarisasi produk barang dan jasa sesuai kebutuhan regional dan global, (6) meningkatkan kualitas produk dan produktivitas usaha industri, (7) meningkatkan kemampuan penguasaan dan penerapan teknologi industri sesuai kebutuhan, (8) menata, mengendalikan dan menertibkan pedagang kaki lima (PKL) terutama dari dimensi tata ruangnya, (9) memperkuat institusi pasar, terutama pasar tradisional, (10) membantu dan mendorong perkembangan usaha perdagangan kecil, menengah dan koperasi dari sisi permodalan dan pola pengelolaan, dan (11) mendorong terbentuknya kemitraan usaha

yang saling menguntungkan antara usaha kecil, menengah dengan usaha besar.

2.2. Program Penataan dan Pengembangan Produk Industri dan Perdagangan

Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas produk industri dan produk perdagangan, memperluas lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat, serta meningkatkan daya saing global.

Sasaran program ini adalah: (1) meningkatnya kualitas produk industri dan perdagangan, (2) meningkatnya keanekaragaman produk industri dan perdagangan, (3) meningkatnya pemanfaatan teknologi industri yang ramah lingkungan, (4) meningkatnya pasar produk industri dan perdagangan, (5) menurunnya volume impor produk industri, (6) meningkatnya partisipasi masyarakat dan investasi swasta dalam pengembangan industri, dan (7) terciptanya sistem usaha industri yang saling mendukung antara industri hulu dan industri hilir.

Kegiatan pokok yang dilakukan untuk mendukung program ini adalah: (1) mengembangkan produk industri yang didukung oleh peningkatan produktivitas faktor-faktor produksi dan produktivitas masyarakat, (2) mengoptimalkan pemanfaatan, rehabilitasi, dan pengembangan prasarana dan sarana pendukung usaha industri dan perdagangan, antara lain transportasi, pergudangan dan permodalan, (3) meningkatkan efisiensi sistem produksi, teknologi pengolahan dan distribusi komoditas produk industri, (4) memanfaatkan planologi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan industri, (5) menerapkan kebijakan industri berorientasi pasar, (6) mengembangkan lembaga teknologi industri dan kegiatan penelitian, (7) mengembangkan industri pengolahan skala rumah tangga/mikro, kecil dan menengah, (8) mendukung penyediaan akses dan kemudahan pada sumber daya potensial, terutama untuk industri kecil dan menengah, (9) mengembangkan pemanfaatan potensi dan partisipasi

masyarakat dan potensi wilayah dalam peningkatan produksi, dan (10) meningkatkan produk dan usaha perdagangan.

2.3. Program Penataan Jaringan Distribusi Produk Industri dan Perdagangan

Tujuan program ini adalah menciptakan jaringan distribusi dan pemasaran produk industri dan perdagangan yang mampu menjamin ketersediaan barang dalam jumlah yang cukup dan harga terjangkau dengan keterlibatan usaha kecil, menengah dan koperasi yang lebih seimbang dan proporsional, serta terhindar dari praktek persaingan usaha yang tidak sehat.

Adapun sasaran program adalah (1) terselenggaranya jaringan dan pemasaran produk industri dan perdagangan yang seimbang dan proporsional, dengan partisipasi UKM yang lebih luas, (2) terjaminnya ketersediaan dan kelancaran distribusi barang yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan dengan harga yang terjangkau, (3) terjaminnya kualitas barang yang dipasarkan, (4) meningkatnya daya saing produk lokal di pasar dalam dan luar negeri, dan (5) berkurangnya distorsi pada distribusi dan pemasaran barang kebutuhan pokok.

Untuk mencapai sasaran di atas, kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) mengembangkan sistem jaringan distribusi dan pemasaran produk industri dan perdagangan yang efisien dan efektif dengan memperhatikan jenis produk yang dipasarkan, skala usaha yang terlibat serta lokasi penyebarannya, (2) meningkatkan peranan UKM, koperasi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan distribusi dan pemasaran produk industri dan perdagangan, (3) mendorong pengembangan daya saing produk lokal menghadapi persaingan global yang semakin ketat, (4) meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana untuk kelancaran distribusi dan pemasaran produk industri dan perdagangan, (5) melakukan terobosan untuk mengurangi distorsi pada distribusi dan pemasaran barang kebutuhan masyarakat, dan (6) membangun jaringan informasi

pasar untuk memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan barang dan jasa.

2.4. Program Pengembangan Ekspor

Tujuan program ini adalah untuk mengembangkan dan memperluas pasar ekspor produk Propinsi DKI Jakarta, mendukung upaya peningkatan daya saing global, serta meningkatkan peranan ekspor dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah: (1) meningkatnya produk ekspor Propinsi DKI Jakarta, (2) meningkatnya sumbangan ekspor non migas pada perolehan devisa dan PDRB, (3) meningkatnya peran aktif masyarakat dan usaha kecil dan menengah (UKM) dalam pengembangan ekspor non migas, dan (4) meningkatnya kualitas manajerial pengembangan produk ekspor.

Untuk mencapai sasaran di atas, kegiatan pokok yang dilakukan adalah: (1) merumuskan strategi perluasan ekspor non migas melalui keterpaduan antara jenis produk dan pasar ekspor, termasuk promosi terpadu yang efektif, (2) meningkatkan aksesibilitas ke negara tujuan ekspor potensial, (3) meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia pelaku ekspor, dan (4) membina dan mendorong usaha kecil dan menengah untuk berkemampuan ekspor.

3. Pengembangan Usaha Daerah

Dalam masa krisis seperti sekarang ini, peningkatan investasi daerah menjadi tantangan yang sangat serius karena menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat akan iklim berinvestasi di Propinsi DKI Jakarta. Penurunan tingkat kepercayaan masyarakat disebabkan oleh beberapa hal, dan diantara yang penting adalah faktor keamanan dan stabilitas politik. Situasi keamanan yang masih belum membaik telah memperbesar ketidakpastian usaha dan menghambat niat investor dalam dan luar negeri untuk segera menanamkan modalnya di Propinsi DKI Jakarta. Untuk itu

pemulihan keamanan dan ketertiban menjadi prasyarat bagi meningkatnya kegiatan investasi.

Di lain pihak usaha daerah (PD/BUMD) maupun usaha swasta yang beraktivitas di Propinsi DKI Jakarta tetap harus tumbuh secara sehat dan mandiri agar gerak perekonomian tidak terganggu dan pelayanan masyarakat tetap dapat berlangsung secara baik. Keterbatasan investasi baru misalnya, dapat diatasi dengan mengoptimalkan sarana-sarana produksi dan pelayanan yang ada sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di dalamnya.

3.1. Program Penataan dan Restrukturisasi Usaha Daerah (BUMD/PT Patungan/Yayasan)

Eksistensi dari adanya usaha daerah (BUMD/PT Patungan/Yayasan) adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, namun demikian BUMD/PT Patungan/Yayasan tetap diarahkan untuk menjadi *profit centre* yang pada gilirannya dapat memberi sumbangan berarti pada pendapatan asli daerah (PAD) Propinsi DKI Jakarta.

Tujuan dilakukannya restrukturisasi pada usaha daerah (BUMD/PT Patungan/Yayasan) adalah untuk mendorong perkembangannya menjadi usaha yang sehat dan mandiri, lepas dari ketergantungan yang besar pada pemerintah daerah.

Sasaran dari program ini adalah: (1) terwujudnya BUMD/PT Patungan/Yayasan yang sehat dan mandiri, (2) meningkatnya kinerja BUMD/PT Patungan/Yayasan yang memberi dampak positif pada kepuasan masyarakat di satu pihak dan peningkatan kontribusinya pada PAD di lain pihak, (3) meningkatnya profesionalisme sumber daya dan manajemen pengelolaannya, dan (4) terwujudnya pengelolaan BUMD/PT Patungan/Yayasan yang transparan dan akuntabel.

Untuk mencapai sasaran di atas, kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah: (1) menata BUMD/PT Patungan/Yayasan menuju pada usaha yang sehat dan mandiri, dari sisi sumber daya, permodalan, keuangan dan

manajemen, (2) melakukan restrukturisasi utang BUMD/PT Patungan/Yayasan, (3) merasionalisasi bidang usaha BUMD/PT Patungan/Yayasan dengan memperhatikan peluang pasar yang tersedia, (4) meningkatkan profesionalisme sumber daya pengelola, dan (5) mendorong peningkatan kualitas pelayanan produk.

3.2. Program Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal dan Usaha Swasta Lain

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong investasi baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri antara lain melalui penyederhanaan prosedur investasi, desentralisasi beberapa kewenangan penanaman modal, serta peninjauan daftar negatif investasi secara berkala. Meskipun demikian masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu disempurnakan. Pertama, pemberian sistem insentif bagi kegiatan investasi dan usaha swasta lain masih kurang konsisten dan transparan. Kedua, masih dirasakan rumitnya sistem perijinan usaha yang pada gilirannya menciptakan ekonomi biaya tinggi, khususnya bagi usaha kecil dan menengah.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan nilai investasi di Propinsi DKI Jakarta secara signifikan serta mempertahankan dan meningkatkan kondisi sarana dan prasarana ekonomi daerah yang telah atau sedang dibangun agar tingkat kemanfaatannya tetap optimal untuk menunjang sektor-sektor produktif.

Sasarannya adalah (1) terciptanya sistem pelayanan investasi yang efisien dan efektif dalam bentuk pelayanan satu atap (*one-stop service*), (2) terciptanya iklim investasi yang kondusif, (3) tersedianya pelayanan jasa sarana dan prasarana ekonomi bagi usaha swasta, yang mampu memenuhi kebutuhan minimum dalam pemulihan ekonomi, dan (4) terjaminnya gerak perekonomian sektor swasta dalam rangka pemulihan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja.

Dalam kaitan itu, kegiatan pokok yang dilakukan adalah: (1) melakukan peninjauan daftar negatif investasi secara berkala sesuai dengan perkembangan keadaan, (2) menguatkan kelembagaan dan profesionalisme sumber daya manusia untuk menjamin terciptanya pelayanan satu atap yang efisien kepada penanam modal usaha swasta, (3) membentuk sistem pemantauan untuk mengidentifikasi praktek-praktek yang menghambat investasi dan meningkatkan kepekaan terhadap berbagai keluhan masyarakat, (4) meningkatkan promosi investasi di dalam dan luar negeri dengan efektifitas yang tinggi, (5) meningkatkan kerjasama ekonomi saling menguntungkan antar daerah, bilateral dan multilateral, (6) meningkatkan kepercayaan investor luar negeri dalam penanaman modal di Propinsi DKI Jakarta dan mengurangi ekonomi biaya tinggi, (7) melaksanakan rehabilitasi, pemeliharaan dan penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana ekonomi dengan mempertimbangkan efektifitas biaya dan kendala waktu serta faktor lainnya seperti modal, teknologi dan konsumen yang dilayani, dan (8) menata ulang desain dan peruntukan sarana dan prasarana ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

3.3. Program Pemberdayaan Aset Daerah

Tujuan program ini adalah untuk menjaga, memelihara serta memanfaatkan/memberdayakan apa saja yang dikategorikan sebagai kekayaan pemerintah daerah/aset daerah. Sehingga dengan demikian aset daerah dapat ditingkatkan utilitasnya, dan dapat dijadikan sebagai pendapatan daerah.

Sasaran program ini adalah termanfaatkannya secara jelas dan pasti aset/barang-barang milik pemerintah daerah bagi pembangunan daerah.

Kegiatan pokok yang dilakukan pada program ini adalah: (1) mengumpulkan data dan meneliti aset maupun barang milik pemerintah daerah, (2) membuat tanda kepemilikan aset pemerintah daerah dari

aspek legal terutama kepemilikan lahan, (3) mengidentifikasi barang-barang pemerintah daerah yang sudah tidak digunakan lagi, (4) menyusun perda mengenai pencatatan, pendayagunaan dan pengamanan aset pemerintah daerah, (5) meningkatkan pemberdayaan/pemanfaatan aset daerah sebagai sumber pendapatan

4. Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi

Keberadaan usaha kecil dan menengah, termasuk yang berskala mikro dan koperasi merupakan gambaran dari sebagian besar wajah kehidupan ekonomi perkotaan. Usaha skala mikro adalah usaha yang dilakukan oleh rumah tangga (usaha rumahan) dengan tujuan sederhana untuk menopang ekonomi keluarga. Posisi seperti itu menempatkan peran usaha skala mikro, kecil, menengah dan koperasi sebagai jalur utama dalam pengembangan sistem ekonomi partisipatif yang melibatkan masyarakat secara luas. Namun demikian perkembangannya selama ini masih jauh tertinggal dibandingkan dengan pelaku ekonomi yang lain.

Jumlah usaha skala mikro serta tenaga kerja yang besar dengan rata-rata kualitas sumber daya manusia yang rendah menjadi hambatan mendasar dalam pengembangan usaha skala mikro. Di samping itu masih adanya kebijakan, termasuk regulasi, birokrasi dan retribusi yang diterapkan kepada mereka secara berlebihan, telah menyebabkan beban biaya transaksi yang besar pada usaha ini, padahal akses mereka terhadap sumber daya produktif seperti modal, teknologi, pasar dan informasi masih sangat terbatas.

Sementara itu tantangan eksternal berupa perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan bersamaan dengan pesatnya mobilitas modal dan investasi belum direspon secara baik. Harus diakui bahwa dari segi potensinya, usaha skala mikro merupakan skala usaha yang dinamis, yaitu memiliki daya responsif, fleksibilitas dan adaptasi yang tinggi terhadap pesatnya perubahan teknologi dan dinamika pasar.

4.1. Program Penataan Kaki Lima dan Usaha Skala Mikro

Tujuan program ini adalah mengembangkan usaha skala mikro yang sehat dan dinamis berlandaskan sistem ekonomi partisipatif dalam rangka mengurangi kesenjangan antar golongan pendapatan dan antar pelaku ekonomi dan juga menata usaha kaki lima agar lebih efektif dan efisien. Lebih dari itu, pengembangan usaha skala mikro dimaksudkan untuk memperluas basis ekonomi Propinsi DKI Jakarta dengan melibatkan ekonomi rumah tangga yang dapat memberikan kontribusi dan struktur ekonomi yang lebih adil serta ketahanan ekonomi yang lebih kuat.

Adapun sasaran program adalah: (1) tertatanya pedagang kaki lima di lokasi yang disediakan, (2) tumbuhnya usaha perdagangan kaki lima yang teratur, efektif dan efisien, (3) tumbuhnya usaha skala mikro yang sehat dan dinamis dengan partisipasi masyarakat yang lebih luas, (4) terwujudnya basis ekonomi Propinsi DKI Jakarta dengan peranan usaha mikro dan usaha besar yang lebih seimbang, (5) meningkatnya ketahanan ekonomi Propinsi DKI Jakarta, dan (6) terwujudnya landasan bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Dalam mencapai sasaran di atas, kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah: (1) mengembangkan usaha kaki lima yang kondusif di lokasi tertentu, (2) menata usaha kaki lima agar lebih teratur, tertib dan produktif, (3) mengembangkan iklim usaha yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya usaha mikro, (4) meningkatkan akses yang lebih luas bagi usaha mikro kepada sumber daya produktif, dan (5) mengembangkan basis ekonomi Propinsi DKI Jakarta yang lebih kuat bagi kehidupan ekonomi partisipatif.

4.2. Program Pemberdayaan UKM dan Koperasi

Tujuan program ini adalah mendorong perluasan kesempatan berusaha bagi UKM dan koperasi dan menjamin kepastian usaha dengan memperhatikan kaidah efisiensi ekonomi sebagai prasyarat utama bagi berkembangnya UKM dan koperasi yang sehat.

Sasaran yang ingin dicapai adalah (1) meningkatnya jumlah dan skala usaha UKM dan koperasi yang sehat dan dinamis dalam kegiatan ekonomi Propinsi DKI Jakarta, (2) meningkatnya akses UKM dan koperasi pada sumber daya produktif terutama permodalan dan pemasaran, (3) berkurangnya beban biaya transaksi untuk mendorong daya saing UKM, (4) bertambahnya jumlah anggota dan masyarakat koperasi yang mempunyai komitmen pada kemajuan koperasi, dan (5) meningkatnya peranan UKM dan koperasi dalam perekonomian Propinsi DKI Jakarta.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas, kegiatan pokok yang dilakukan adalah: (1) menyempurnakan peraturan daerah, perijinan, birokrasi, dan retribusi terkait dengan UKM dan koperasi, (2) meningkatkan penegakan hukum dan perlindungan usaha terhadap persaingan yang tidak sehat, (3) meninjau peraturan tentang tata niaga dan penyaluran barang kebutuhan pokok, (4) memberikan insentif dan kemudahan dalam mengakses sumber daya produktif, (5) mendorong pengembangan dan penerapan teknologi yang lebih cocok untuk UKM dan koperasi, (6) mengembangkan perkampungan/kawasan industri kecil sekaligus wisata minat khusus, (7) meningkatkan koordinasi lintas pelaku (*stake holder*) dalam pengembangan UKM, (8) meningkatkan manajemen dan efisiensi organisasi koperasi, (9) mengembangkan kemitraan usaha saling menguntungkan antara koperasi dengan badan usaha lainnya, dan (10) mengembangkan koperasi sebagai suatu gerakan masyarakat.

4.3. Program Pengembangan Kewirausahaan

Program ini bertujuan untuk mengembangkan perilaku dan wawasan kewirausahaan bagi UKM untuk meningkatkan daya saing UKM. Sasaran yang akan dicapai adalah (1) meningkatnya pengetahuan serta sikap wirausaha dalam dunia kegiatan UKM, dan (2) meningkatnya efisiensi dan produktivitas usaha.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: (1) memasyarakatkan kewirausahaan dan pola usaha produktif bagi UKM yang belum

berkembang, (2) mengembangkan inkubator bisnis dan teknologi terutama yang dikelola oleh dunia usaha/masyarakat untuk mendukung pengembangan UKM dan wirausaha baru, (3) mengembangkan sistem insentif dan pembinaan untuk memacu pengembangan UKM berbasis teknologi, (4) mengembangkan kemitraan usaha antara UKM dengan perusahaan besar yang menerapkan alih teknologi atau manajemen modern kepada UKM mitranya, dan (5) mengembangkan jaringan produksi dan distribusi melalui pemanfaatan teknologi informasi.

4.4. Program Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro

Tujuan program ini adalah mengembangkan dan menerapkan skema kredit usaha kecil yang lebih menjamin akses usaha mikro, kecil dan menengah kepada sumber permodalan, termasuk penguatan lembaga keuangan mikro dan jaringan kerja yang lebih transparan dan akuntabel.

Sasaran program ini adalah (1) terselenggaranya penerapan skema kredit usaha kecil yang mendorong akses usaha kecil, menengah dan mikro kepada sumber permodalan, (2) tersosialisasinya skema kredit dan prosedur untuk mengakses sumber permodalan, dan (3) semakin meratanya penyaluran dana kepada UKM dan usaha mikro.

Kegiatan pokok yang dilakukan pada program ini adalah: (1) menciptakan skema kredit usaha kecil yang menjunjung rasa keadilan, transparansi dan akuntabilitas publik, (2) membentuk lembaga keuangan mikro yang mengarah pada pelayanan satu atap, dan (3) meningkatkan koordinasi lintas pelaku untuk mengoptimalkan penyaluran dan pengembalian kredit usaha kecil.

5. **Peternakan, Perikanan dan Kelautan**

Keberadaan dan peranan peternakan di Propinsi DKI Jakarta lebih diarahkan untuk menjamin ketersediaan produk peternakan terutama daging dan telur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya pengembangan perikanan diarahkan untuk peningkatan produksi, penganekaragaman produksi, pemenuhan konsumsi ikan bagi penduduk,

serta peningkatan ekspor. Khusus budidaya ikan hias diarahkan untuk menghasilkan produk bernilai tinggi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat produsennya.

5.1. Program Pengembangan Produksi Peternakan dan Perikanan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan darat maupun laut, yang berdaya saing tinggi untuk menjamin ketersediaan gizi dan pangan bagi masyarakat, meningkatkan ketersediaan produk peternakan dan perikanan, serta memperbaiki pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perikanan. Untuk peternakan, pola usaha pengembangannya diarahkan dalam bentuk kerjasama dengan propinsi diluar Jakarta yang dapat menjamin suplai bagi warga kota, serta secara terbatas pengembangan sapi perah.

Sasaran dari program ini adalah: (1) meningkatnya produksi peternakan dan perikanan unggulan terutama sapi perah, unggas, dan ikan hias, (2) meningkatnya nilai tambah dan pendapatan bagi masyarakat peternakan dan nelayan, (3) meningkatnya kesehatan hewan ternak, (4) terpeliharanya sumber daya lingkungan di lokasi peternakan dan perikanan, (5) terjaminnya ketersediaan produk peternakan dan perikanan yang berkualitas dan sehat untuk dikonsumsi, (6) meningkatnya keanekaragaman produksi dan konsumsi ternak dan ikan masyarakat, (7) meningkatnya pemanfaatan teknologi produksi peternakan dan perikanan dan pengolahannya, (8) meningkatnya partisipasi masyarakat dan investasi swasta dalam pengembangan bisnis peternakan dan perikanan, dan (9) meningkatnya ekspor produk perikanan.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: (1) mengembangkan komoditas ternak dan ikan unggulan terutama sapi perah, unggas, dan ikan hias, (2) meningkatkan akses masyarakat peternak dan nelayan pada sumber-sumber permodalan, teknologi dan informasi pasar, (3) mengoptimalkan pemanfaatan lahan peternakan, (4) mengembangkan dan menerapkan standar penilaian mutu produk dan pengawasannya, (5) mengembangkan

sistem kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara nelayan dan pengusaha perikanan, (6) mengembangkan ekspor produk perikanan, (7) mengendalikan akses lingkungan dari keberadaan usaha peternakan dan perikanan, dan (8) mengembangkan wisata minat khusus peternakan dan perikanan.

5.2. Program Penataan Distribusi Hasil Peternakan dan Perikanan

Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan menata sistem penyediaan dan distribusi produk peternakan dan perikanan, menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi (daging, telur dan ikan) bagi masyarakat dalam jumlah yang cukup dan kualitas memadai.

Sasaran program ini adalah: (1) terselenggaranya sistem distribusi dan pemasaran produk peternakan dan perikanan yang efisien dan efektif, (2) terjalinnya kerjasama antar daerah dalam pengadaan dan penyaluran hewan ternak dan ikan, (3) terjaminnya pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat yang bersumber dari produk peternakan dan perikanan yang memenuhi standar, (4) meningkatnya kualitas pengawasan dan produk peternakan dan perikanan yang dipasarkan, dan (5) meningkatnya daya saing produk perikanan dalam pasar internasional.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: (1) mengembangkan sistem penyediaan dan distribusi produk peternakan dan perikanan yang menjamin kelancaran penyaluran produk, (2) meningkatkan kualitas dan keamanan produk peternakan dan perikanan yang dipasarkan dan dikonsumsi, (3) mengendalikan penyebaran hama penyakit ternak yang akan dipasarkan, (4) mengembangkan kapasitas kelembagaan peternakan dan perikanan yang menjamin kelancaran distribusi produk peternakan dan perikanan, (5) mengembangkan standarisasi mutu produk, (6) menjalin kerjasama antar daerah dalam ketahanan pangan (produk peternakan), dan (7) mengembangkan sarana prasarana penangkapan dan pengolahan ikan.

5.3. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut

Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumber daya laut yang dimiliki Propinsi DKI Jakarta untuk mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi, lapangan kerja dan pendapatan masyarakat kelautan.

Sasaran program ini adalah: (1) meningkatnya pemanfaatan sumber daya laut untuk kegiatan ekonomi seperti wisata bahari, transportasi, (2) berkembangnya usaha ekonomi kelautan non perikanan, dan (3) terciptanya kelestarian sumber daya laut untuk pembangunan berkelanjutan.

Kegiatan yang dilakukan adalah: (1) melakukan inventarisasi dan evaluasi potensi sumber daya laut yang dimiliki Propinsi DKI Jakarta, (2) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut untuk kegiatan ekonomi produktif, (3) meningkatkan efisiensi sistem pengelolaan sumber daya laut, (4) mengembangkan koordinasi kebijakan dan program pelestarian lingkungan, dan (5) menyusun informasi peta potensi pengembangan sumber daya laut.

1. 6. Pertanian dan Kehutanan

Keberadaan sektor pertanian di Propinsi DKI Jakarta tidak semata-mata ditujukan untuk kepentingan ekonomi (yaitu menghasilkan produk pertanian, menciptakan lapangan kerja dan pendapatan petani), melainkan sebagai unsur ketahanan pangan kota dan penyangga/reservasi lingkungan perkotaan dan ekosistemnya. Hal ini menjadi penting karena luas lahan di Propinsi DKI Jakarta yang terbatas dengan beban jumlah penduduk dan kegiatan non-pertanian yang semakin tinggi tetap harus diimbangi dengan keseimbangan reservasi lahan. Sementara itu, keberadaan fungsi kehutanan ditujukan untuk membangun hutan kota dalam upaya pengendalian dan pelestarian lingkungan perkotaan bagi kehidupan masyarakat yang berkelanjutan. Pada sisi lain, pengawasan peredaran hasil hutan yang masuk dari berbagai propinsi perlu makin ditingkatkan.

6.1. Program Pengembangan Produksi, Pemasaran Pertanian dan Kehutanan

Pengembangan produksi pertanian dan kehutanan bertujuan untuk menyempurnakan model pertanian, meningkatkan produksi pertanian dan kehutanan, mendorong terbentuknya lapangan kerja dan pendapatan petani, dengan tetap menjaga fungsi pertanian dan hutan kota sebagai penyangga lingkungan hidup perkotaan.

Sasaran pengembangan produksi pertanian dan kehutanan adalah: (1) meningkatnya produksi hortikultura bernilai tinggi terutama sayur-sayuran dan buah-buahan, (2) meningkatnya produksi hasil tanaman hias, (3) meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani, (4) meningkatnya pemanfaatan lahan dan teknologi pertanian lahan sempit, serta (5) meningkatnya kuantitas dan kualitas produksi kayu dan hasil hutan lainnya.

Kegiatan pokok yang dilakukan dalam pengembangan produksi pertanian dan kehutanan adalah: (1) menginventarisir dan mengevaluasi sumber daya lahan pertanian yang ada di Propinsi DKI Jakarta, (2) mengembangkan dan memanfaatkan teknologi pertanian lahan sempit untuk peningkatan produksi, seperti hidroponik untuk sayuran dan bioteknologi/bioperforasi untuk buah-buahan, (3) memperluas pemanfaatan kawasan pertanian termasuk lahan kurang produktif dengan tetap mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan peraturan yang berlaku, dan (4) mengembangkan wisata agro untuk mendukung pengembangan wisata minat khusus.

Program pengembangan pemasaran pertanian dan kehutanan bertujuan untuk mengembangkan sistem pengadaan, distribusi dan penyaluran bahan pangan, agribisnis pertanian serta hasil hutan yang menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup dan harga terjangkau serta terhindar dari praktek monopoli yang tidak sehat dan pencegahan pengangkutan dan perdagangan hasil hutan yang tidak memenuhi peraturan yang berlaku.

Sasaran pengembangan pemasaran pertanian dan kehutanan ini adalah: (1) terselenggaranya pengadaan, distribusi dan penyaluran bahan pangan yang efisien dan efektif, (2) terjaminnya penyediaan pangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, (3) meningkatnya kualitas pangan dan skor mutu pola pangan harapan, (4) meningkatnya partisipasi masyarakat dan investasi swasta dalam pengembangan agribisnis pertanian, (5) terkendalinya pemasaran dan konsumsi kayu dan hasil hutan lainnya, (6) meningkatnya kualitas kayu dan olahan hasil hutan lainnya yang dikonsumsi masyarakat, dan (7) berkurangnya praktek perdagangan hasil hutan yang menyalahi peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan pokok yang dilakukan dalam pengembangan pertanian dan kehutanan adalah: (1) mengembangkan sistem pengadaan, distribusi dan penyaluran bahan pangan, dengan memperhatikan dimensi skala usaha dan penyebaran lokasi, (2) mengembangkan agribisnis pertanian yang lebih efisien dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan investasi swasta, (3) meningkatkan kualitas pangan yang dipasarkan untuk mencapai skor mutu pola pangan harapan yang lebih baik, (4) meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan yang terkait dengan ketahanan pangan, (5) mengembangkan peraturan yang mendukung sistem persaingan usaha agribisnis yang sehat dan produktif, (6) menginventarisir dan mengevaluasi perkembangan pemasaran dan konsumsi kayu dan hasil hutan lainnya di Propinsi Propinsi DKI Jakarta, (7) mengembangkan sistem pengadaan dan distribusi kayu dan hasil hutan lainnya, (8) meningkatkan kualitas produk kayu dan hasil hutan lainnya yang dikonsumsi masyarakat, (9) mengembangkan standarisasi mutu kayu olahan, dan (10) menegakkan hukum dan peraturan secara tegas dan konsisten terhadap penyimpangan dalam perdagangan dan penyaluran kayu dan hasil hutan lainnya.

6.2 Program Pengembangan Hutan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi hutan kota sebagai hutan wisata dalam upaya meningkatkan penghijauan kota, serta untuk meningkatkan daya dukung lingkungan perkotaan dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan sebagai basis kehidupan yang berkelanjutan.

Sasaran program ini adalah (1) meningkatnya pengembangan ekowisata, (2) meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau, (3) meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam peningkatan daya dukung lingkungan perkotaan serta menjadikan kota Jakarta yang teduh, nyaman, sehat dan indah.

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: (1) meningkatkan pembibitan untuk program penghijauan, (2) mengembangkan hutan kota, (3) meningkatkan penataan hutan dan kawasan lindung, (4) meningkatkan fungsi hutan kota dan peran serta masyarakat dalam kepedulian terhadap penghijauan dan hutan kota, dan (5) menegakkan hukum dan peraturan secara tegas bagi pengrusakan hutan kota dan hutan lindung serta pemanfaatan liar ruang terbuka hijau yang ada.